

# **EVO MORALES DAN PEMBENDUNGAN PENGARUH AMERIKA SERIKAT DI BOLIVIA**

Wahid Musthafa

2012 051 0324

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [wahidmusthafa@gmail.com](mailto:wahidmusthafa@gmail.com)

## **Abstract**

*In December 2005, leftist former coca farmer, Evo Morales, and his party Movement Toward Socialism (MAS) won the presidential elections in Bolivia. His victory came after twenty years of neoliberal measures that increased poverty and fostered social unrest in the country. Throughout the 1990s and 2000s, social movements evolved as an important political actor in the country and their anti-neoliberal struggles led to the resignation of two presidents and a crack in the existing political system. Since Morales' victory, Bolivia has promoted an alternative development model that is moving away from the basic principles of neoliberalism.*

*The US has criticized Morales for his close ties to Venezuelan President Hugo Chavez and Cuban President Fidel Castro. In the first of the wave of year-long presidential elections in Latin America to mark a significant shift in the western hemispheric balance of power between the United States and Brasil, bolivians voted into power Morales who is pledged to end Bolivia's dependence on the United States and to join the forces of regional autonomy and integration.*

*Presenting him self as Washington "worst nightmare" Morales stands on the far left of the current tendencies in Latin America to seek alternatives to Washington Neoliberal Economic Policies. An admirer of Cuba's Fidel Castro and Venezuela's Hugo Chavez, Morales based his campaign on promises to wrest control of the gas reserves and the hydrocarbons industry from the multinational energy corporation that had invested in bolivia during its pro-US administrations of the past 20 years.*

*Morales also pledged to decriminalize the cultivation of the coca leaf for its traditional use as a mild stimulant and medicinal tea, and to fight the cocaine trade, promising to end cooperation with Washington's Programs to eliminate the crops. Morales wrapped up his proposals in an ideology that attacked the neoliberal market model and offered in its place a vision of cooperative socialism and regional integration similar to Chavez "Bolivarian Revolution"*

*Keywords: Socialism, Social Movement, Latin America, Bolivia, Evo Morales*

## **Pendahuluan**

Sejak melakukan demokratisasi di tahun 1982, Pemerintahan Negara Bolivia menganut ideologi anti-komunis/sosialis dan pro-barat. Dibawah pimpinan Victor Paz Estenssoro (1985-1989) Bolivia mengadopsi nilai-nilai liberalis pasar bebas melalui kerjasama pemerintahannya dengan IMF untuk menyelesaikan masalah perekonomian Bolivia. Pada pemerintahan Estenssoro, Bolivia melepaskan kontrol atas kekayaan minyak negara setelah IMF memberikan bantuan keuangan. Selain berusaha melakukan perbaikan ekonomi negara melalui privatisasi minyak, ia juga membantu tentara Amerika Serikat dalam mengurangi produksi koka dan penjualan kokain pada tahun 1988,<sup>1</sup> namun usaha kerjasama militer dengan Amerika Serikat tersebut tidak begitu berhasil karena ditentang oleh sebagian besar penduduk Bolivia.

Selanjutnya kebijakan pro-liberalis/kapitalis semakin nampak jelas pada kekuasaan Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada (1993-1997) dibawah pemerintahannya, Lozada menerapkan program kapitalisasi secara besar-besaran. Ia bekerja sama dengan para investor asing dalam membagi kepemilikan saham dan kendali manajemen atas perusahaan-perusahaan negara sebesar 50%. Program liberalisasi Lozada tertuju pada perusahaan negara yang diantaranya Perusahaan Perminyakan negara *Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos* (YPFB), sistem telekomunikasi, penerbangan, perusahaan perkeretaapian, dan listrik.

Kebijakan serupa kembali diterapkan di masa kepresidenan Jenderal Hugo Banzer (1997-2001) pada april 2000, Banzer menandatangani kontrak untuk memprivatisasikan perusahaan suplai air minum di Provinsi Cochabamba, kontrak tersebut memberikan kuasa pada perusahaan *Aguas del Tanari* untuk mengelola suplai air Bolivia.<sup>2</sup>

Sejarah presiden Bolivia selalu pro-barat, mendukung liberalis/kapitalis dan selalu berafiliasi dengan Amerika Serikat berubah pasca kemenangan Evo Morales dalam pemilu presiden di tahun 2005. Sebelumnya, Morales merupakan mantan petani koka yang berubah menjadi pengacara atau perwakilan petani koka

---

<sup>1</sup> Lesley Gill, *Teetering on the rim: Global restructuring, daily life, and the armed retreat of the Bolivian state*, Columbia University Press.2000

<sup>2</sup> *Leasing the Rain*, <http://web.archive.org>

atas sikap represif yang pemerintah Bolivia lakukan saat para petani koka melakukan demonstrasi. Sikap pemerintah Bolivia yang kurang memperdulikan kesejahteraan para petani koka menggerakkan Morales untuk mendirikan sebuah gerakan rakyat untuk menyatukan seluruh petani koka di Bolivia. Dalam perkembangannya, gerakan rakyat petani koka tersebut semakin berkembang dengan bergabungnya kelompok-kelompok buruh, pekerja tambang, para guru, dan warga indian Bolivia yang merupakan penduduk asli Bolivia dan memiliki jumlah populasi lebih dari separuh jumlah penduduk Bolivia secara keseluruhan.

Pada tahun 2006 Morales mengajak pendukungnya untuk melakukan demonstrasi menuntut nasionalisasi perusahaan air dan minyak. Ribuan orang melakukan aksi demonstrasi di jalanan Bolivia menuntut Presiden Lozada untuk menasionalisasi sektor migas Bolivia dan perusahaan air. peristiwa yang dikenal dengan sebagai ‘Hantu Oktober’ tersebut berhasil menurunkan Presiden Lozada karena enggan merubah kebijakannya, kemudian Lozada digantikan oleh Carlos Mesa yang menjanjikan rakyat Bolivia dirinya akan menasionalisasi perusahaan minyak tersebut.

Demi memenuhi tuntutan rakyat Mesa melakukan reformasi terhadap pembagian keuntungan yang didapatkan dari perusahaan migas menjadi 50% untuk keuntungan negara dan 50% untuk keuntungan swasta. Namun reformasi yang ia ajukan gagal mengambil hati para demonstran yang tetap menuntut keberaniannya untuk menasionalisasi sektor migas Bolivia.<sup>3</sup> Akibat kurangnya dukungan rakyat terhadap pemerintahannya, Mesa mengajukan surat pengunduran dirinya pada Kongres Bolivia dan disetujui pada 6 juni 2005, selanjutnya kursi Presiden Bolivia ditempati Eduardo Rodriguez, seorang kepala hakim yang dinilai netral oleh rakyat Bolivia. Rodriguez mengusulkan untuk mempercepat pemilu menjadi 18 desember 2005 dan disetujui oleh para demonstran.

Pada masa kampanye pemilu presiden 2005, Morales banyak menyuarakan ketidaksukaannya pada sistem ekonomi neoliberalisme yang dinilainya hanya menyengsarakan para petani dan penduduk Bolivia secara umumnya. Dalam orasi terbuka ia menyatakan “... *musuh utama paling jahat dari*

---

<sup>3</sup> *Lessons from Bolivia: Re-nationalizing the Hydrocarbon Industry*, <http://cepr.net>

*umat manusia adalah kapitalisme ...*” sikapnya yang secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya pada Amerika Serikat, berbuntut pada ancaman pencabutan bantuan Amerika Serikat ke Bolivia oleh Duta Besar Amerika Serikat Emanuel Rocha. Namun pemilu 2005 menorehkan sejarah baru dengan menangnya Morales secara mutlak diatas 50% total suara pemilih.

Pemilu Presiden Bolivia 2005 menjadi sejarah kebangkitan ideologi sosialisme di tanah demokrasi. Keberhasilan Morales menjadi presiden digerakkan oleh paham sosialisme yang menekankan pada praktik dan bukan sekedar retorika yang bersifat ideologis. Namun Morales juga tidak akan dapat menggapai kursi presiden bila tidak didukung oleh gerakan massa yang kuat dan simpatik.

## **Kerangka Dasar Pemikiran**

### **1. Konsep Ideologi**

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh *Destutt de Tracy* pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains about ideas”.<sup>4</sup> Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Robert A. Haber mendefinisikan ideologi sebagai sebuah proses intelektual yang memiliki beberapa elemen: (1) seperangkat nilai-nilai dan moral yang dianggap sebagai hal yang mutlak (2) garis besar penciptaan masyarakat yang teratur dimana nilai-nilai akan terwujud (3) kritik sistematis atau penegasan dari pengaturan sosial saat ini dan bentuk analisis dinamika masyarakat (4) rencana strategis untuk mendapatkan suatu tujuan dari sekarang untuk masa depan.<sup>5</sup>

Ideologi muncul dari tatanan dan cenderung melestarikan tatanan yang ada dengan adanya legitimasi untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam sebuah organisasi serta harus diperjuangkan oleh individu. Salah satu cara ideologi mempermudah perubahan adalah dengan menciptakan solidaritas.

---

<sup>4</sup> Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia, Jakarta, 1992. Hal 96

<sup>5</sup> Mark N. Hagopian. *Regimes, Movement, and Ideologies: A Comparative Introduction To Political Science*. Longman Inc. New York, 1978. Hal 391

Ideologi nasional telah menciptakan masyarakat yang bersatu. Sebuah bangsa yang sedang membangun perubahan ke arah yang maju menempuh jalan yang berlainan, namun syarat sebuah pembangunan adalah kesatuan ideologi antara pemimpin dan pengikutnya. Nasionalisme mampu mempermudah penyatuan, sebab nasionalisme cenderung membangkitkan solidaritas dan mengesahkan sentralisasi kekuasaan.

Pengertian sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya. Sosialisme muncul pertama kali pada abad ke-19 yang dikenal juga dengan sosialis utopia. Sosialisme ini didasarkan pada pandangan kemanusiaan (*humanitarian*) karena paham sosialis lebih luwes dalam memperjuangkan nasib buruh. Baik ideologi marxisme, sosialisme, maupun komunisme bermula dari revolusi industri. Revolusi industri mempengaruhi keadaan sosial khususnya terhadap kaum buruh.

Dalam pandangannya, Karl Marx (1818-1883) ingin mengubah kekacauan sistem ekonomi maupun sosial menjadi lebih baik. Namun untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan cara radikal seperti revolusi, kudeta, dll. Kemajuan ke arah yang lebih baik akan didapatkan bila melakukan perubahan secara keseluruhan. Pemikiran Marx inilah yang kemudian menjadi lahirnya ideologi marxisme yang nantinya berkembang menjadi sosialisme dan komunisme.

Paham sosialisme selalu dihubungkan dengan komunisme, namun pada dasarnya paham komunisme berakar dari sosialisme. Komunisme dibangun diatas fondasi atau dasar sebuah impian sosialisme. Itulah mengapa penganut sosialisme disebut sebagai sosialisme utopia karena sosialisme merupakan sekedar mimpi tanpa tindakan, sedangkan komunisme yang dicetuskan Marx adalah sebuah tindakan dari sosialisme.

Komunisme adalah bagian dari aliran sosialisme yang bergerak lebih radikal, dimana sosialisme pada tataran teoritis suatu paradigma sosiologi sedangkan komunisme sudah bergerak dalam tataran praksis sebagai suatu sistem ideologi kenegaraan yang terimplementasi secara menyeluruh dan cenderung radikal di segala sektor kehidupan.

Ideologi sosialisme mulai berkembang di Bolivia kala Presiden Morales memimpin negeri yang bermayoritaskan suku indian tersebut. Morales sendiri merupakan sosok yang dekat dengan presiden sosialis Venezuela Hugo Chavez, sehingga pemikirannya banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosialis terlebih Morales juga mengidolakan Fidel Castro yang sangat mencintai sosialisme. Sosialisme Bolivia merupakan sosialisme yang demokratis karena mengutamakan partisipasi rakyat dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Walaupun dalam perkembangannya, sosialisme abad ke-21 telah diubah dan disesuaikan dengan kultur masyarakat Amerika Latin. Namun inti dari sosialisme abad ke-21 tersebut masih sama dengan sosialisme marxis yang mengasumsikan perjuangan kelas buruh dibawah pimpinan partai-partai sosialis-demokratis.

Perbedaan utama sosialisme abad ke-21 dengan sosialisme di masa Uni Soviet adalah pemberian kekuasaan terhadap rakyat sipil. Hal ini berimplikasi pada kelanjutan suatu ideologi. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa referendum terhadap kepemimpinan sosialis Morales apakah akan tetap dilanjutkan atau melakukan pemilihan presiden ulang. Hasilnya, 60% dari 90% Rakyat Bolivia yang memberikan suaranya didominasi oleh kalangan menengah kebawah yang masih mendukung Morales dengan ideologi sosialisme.

## **2. Teori Gerakan Sosial**

Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama, atau sebuah gerakan yang bertujuan mencapai kepentingan bersama melalui *collective action*.<sup>6</sup> Aksi atau tindakan kolektif merupakan salah satu jenis gerakan sosial, menurut Sidney Tarrow tindakan kolektif memiliki kekuasaan (*power*) karena menentang lawan dengan membangun solidaritas. Argumen utama yang dibangun oleh Tarrow mengenai munculnya *power* pada gerakan sosial adalah kekuatan untuk tumbuh ketika masyarakat yang tergabung dengan gerakan sosial secara berkelanjutan melakukan perlawanan terhadap kelompok elit kekuasaan yang tidak sepihak. Sedangkan gerakan sosial muncul ketika ada kesempatan politik yang membuka

---

<sup>6</sup> Suharko, *Gerakan sosial. Konsep, strategi, aktor, hambatan, dan tantangan gerakan sosial di Indonesia*. Averroes Press, Malang. 2006.

peluang kepada para pelaku sosial. Kesempatan sebelumnya hanya dimiliki oleh aktor politik terbatas, dengan demikian sebelumnya mereka hanya memiliki sedikit peluang politik.

Pada masa pemerintahan Gonzalo Sanchez de Lozada, undang undang terhadap kedudukan warga *Law of Popular Participation* (LPP) dibentuk pada tahun 1994 dalam usaha pemerintah lebih mendekatkan diri terhadap Rakyat Bolivia.<sup>7</sup> Dengan adanya LPP ini, Pemerintah Bolivia mengakui secara resmi organisasi-organisasi massa di tingkat akar rumput seperti organisasi warga urban, serikat petani *campesino* dan organisasi komunitas asli Indian.

Dalam konteks perjuangan Morales di Bolivia, Morales telah menjadi *icon* dari gerakan sosial yang menepatkan diri pada garis perjuangan untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih layak bagi komunitas petani koka, para buruh, pekerja tambang, para guru, dan masyarakat Indian Bolivia. Gerakan yang dilakukan Morales dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan atas pola ekonomi neoliberalisme yang telah menjadikan tingkat kesejahteraan mereka semakin menurun, ketidakpuasan atas privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang tidak membawa perubahan kehidupan bagi mereka menjadi alasan utama bagi Morales dan kelompoknya melakukan perlawanan terhadap neoliberalisme demi terciptanya kehidupan yang lebih layak dan berkeadilan.

Melalui gerakan sosial yang dipimpin Morales, mereka hendak menata kembali relasi antara negara, masyarakat, dan perekonomian untuk menciptakan ruang publik yang lebih berkeadilan dan lebih demokratis.

### **Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang bersifat literasi atau metode penelitian yang didasarkan pada riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan ini yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, majalah, koran yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penulis

---

<sup>7</sup> Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*, Zed Books, London, 2006.

juga memperoleh data-data dari media internet sebagai sarana pendukung utama serta sumber-sumber lain yang relevan dan valid yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

## **Pembahasan**

### **1. Diplomasi**

#### **a. Persona Non Grata Duta Besar Amerika Serikat**

Pada tahun 2008, Pemerintahan Morales dihadapkan pada tuntutan empat provinsi kaya sumber daya alam akan otonomi daerah. Keempat gubernur provinsi tersebut yaitu Santa Cruz, Beni, Pando, dan Tarija menuntut adanya desentralisasi ekonomi atau pemberian hak khusus bagi keempat provinsi tersebut untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya alam tanpa campur tangan pemerintah pusat.<sup>8</sup> Menurut keempat gubernur tersebut, rencana nasionalisasi Morales terhadap sumber daya alam akan mengokohkan peran pemerintah pusat dalam pemerintah daerah hal ini bertentangan dengan nilai demokrasi yang menekankan desentralisasi.

Keempat provinsi tersebut, kemudian saling beraliansi dengan nama *media luna*.<sup>9</sup> Tuntutan *media luna* akan otonomi daerah yang kurang ditanggapi oleh Morales memaksa para gubernur untuk melakukan mobilisasi massa yang tidak menyukai pemerintahan sosialis Morales. Para pengunjuk rasa yang diakomodir oleh *media luna* berhasil menguasai jalur gas bumi Bolivia dari kekuatan militer pada tanggal 10 september 2008.

Pada tanggal 10 september 2008, pemerintah Bolivia juga memberikan kesempatan pada Duta Besar Amerika Serikat untuk meninggalkan Bolivia dalam kurun waktu 72 jam. Duta Besar Philip Goldberg telah ditetapkan sebagai orang yang tidak diinginkan (*Persona non Grata*) oleh Pemerintah Bolivia atas dakwaan telah menentang Pemerintahan Bolivia dengan bersekutu dengan *media luna*.<sup>10</sup> Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa Duta Besar Philip Goldberg mengadakan pertemuan dengan Gubernur Santa Cruz, Ruben Costas.

---

<sup>8</sup> *Bolivia accuses U.S. of funding Morales opponents* <http://www.reuters.com>

<sup>9</sup> *Bolivia*. <http://www.state.gov>

<sup>10</sup> *Bolivia accuses U.S. of funding Morales opponents*. <http://www.reuters.com>

Sebelumnya, pada agustus 2007, Menteri Kepresidenan Juan Ramon Quintana menemukan fakta bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat memberi bantuan dana pada kelompok oposisi. Namun juru bicara kedutaan membantah tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa dana tersebut ditujukan untuk mendanai demokrasi di Bolivia

#### b. Mengusir USAID

Pasca terpilihnya Morales sebagai Presiden Bolivia, banyak upaya-upaya distabilisasi sosial, keamanan dan politik di Bolivia dengan tujuan untuk menjatuhkan Morales dari kepemimpinannya. Pemerintah Bolivia mengungkapkan bahwa munculnya gerakan-gerakan untuk menggulingkan Pemerintahan Morales merupakan strategi yang dijalankan oleh Negara Amerika Serikat karena menilai kepemimpinan Morales justru tidak memberikan keuntungan bagi Negara Amerika Serikat.

Upaya Amerika Serikat untuk melakukan distabilisasi politik di Bolivia dengan mendukung pihak oposisi bahkan menggunakan lembaga bantuan USAID yang notabene adalah lembaga independen, untuk membantu pihak oposisi menentang pemerintahan Morales.<sup>11</sup> Salah satu prioritas utama USAID adalah pendanaan yang luas dan pelatihan partai politik oposisi melalui *International Republican Institute* (IRI) dan *National Democratic Institute* (NDI). USAID telah menerima bantuan dana dan politik sebesar US\$ 1.25 juta dari pemerintah Amerika Serikat yang di dedikasikan untuk pelatihan bagi anggota partai politik pada proses politik dan pemilu, termasuk majelis konstituante dan referendum tentang otonomi. Manfaat utama dari pendanaan ini telah membantu partai politik oposisi seperti PODEMOS, MNR, MIR dan lebih dari 100 LSM menjadi berorientasi politis.

Dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian Jeremy Bigwood dan Eva Golinger mengungkapkan bahwa USAID telah menginvestasikan lebih dari US\$ 97 juta dalam upaya “desentralisasi” dan “otonomi daerah” melalui proyek-proyek dan kepada partai-partai oposisi Bolivia sejak tahun 2002. Dalam dokumen

---

<sup>11</sup> *Unpacking US Democracy Promotion in Bolivia: From Soft Tactics to Regime Change*  
lap.sagepub.com

dikonfirmasi bahwa USAID telah mengelola sekitar US\$ 85 juta per tahun di Bolivia dalam program-program yang berkaitan dengan keamanan, demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan investasi sumber daya manusia.

Pada tanggal 1 Mei 2013 yang bertepatan pada hari buruh internasional, Presiden Bolivia Evo Morales menyatakan mengusir USAID dari Bolivia. Dalam pernyataannya, Morales mengatakan bahwa *"no lack of US institutions which continue to conspire against our people and especially the national government, which is why we're going to take the opportunity to announce on this May Day that we've decided to expel USAID."*<sup>12</sup> Sebelumnya Morales juga mengecam USAID karena program mereka lebih condong ke arah politik daripada program sosial.

Dari beberapa fakta-fakta yang ditemukan dalam investigasi kegiatan USAID di Bolivia, ditemukan upaya penggulingan kepemimpinan demokratis Morales dari jabatannya. Salah satu artikel Neil Burron, menjelaskan peranan Amerika Serikat melalui USAID.<sup>13</sup> Pertama, Amerika Serikat berusaha untuk menghindari destabilisasi sebelum 2005 untuk mempertahankan pemerintah yang berkuasa. Namun, setelah terpilihnya Morales sebagai Presiden Bolivia pada pemilu 2005, Amerika Serikat mempromosikan destabilisasi dan penggulingan pemerintah Morales.

## **2. Militer**

Pada tahun 1989 kebijakan Amerika Serikat terhadap anti narkoba menghasilkan perang terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang yang dikenal dengan *War on Drugs*. Di Bolivia permasalahan peredaran dan produksi koka datang ketika Hugo Banzer yang menjabat sebagai Presiden Bolivia menjanjikan pemusnahan atas ladang koka kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai konsekuensi masuknya bantuan dana Amerika Serikat pada pembangunan

---

<sup>12</sup> *Bolivian President Evo Morales Expels USAID* <http://www.bbc.com>

<sup>13</sup> *Unpacking US Democracy Promotion in Bolivia: From Soft Tactics to Regime Change* [lap.sagepub.com](http://lap.sagepub.com)

nasional Bolivia.<sup>14</sup> Program yang lebih dikenal dengan *Coca Zero* ini telah membuat para petani koka sangat dirugikan akibat kebijakan sepihak pemerintah. Pembasmian ladang koka telah menghilangkan mata pencaharian tradisional mereka selama beribu-ribu tahun, bahkan pembasmian ini telah menghasilkan kejahatan kemanusiaan dengan fakta bahwa banyaknya pembunuhan yang dilakukan pihak militer terhadap para petani koka.

Pemerintahan Morales sangat berbeda pendapat dengan Amerika Serikat maupun Hugo Banzer dalam masalah undang-undang anti narkoba. Menurut Morales praktek mengunyah daun koka oleh penduduk pribumi Bolivia telah berlangsung selama ribuan tahun dan tidak pernah menimbulkan masalah narkoba dalam masyarakat Bolivia. Itulah sebabnya Morales mempercayai bahwa masalah kokain harus diselesaikan pada sisi konsumsi bukan dengan membasmi perkebunan koka Morales menyatakan “*kami akan menerapkan kebijakan nol kokain, nol perdagangan narkoba, namun bukannya nol koka*”<sup>15</sup>

Untuk itu pada September 2008, Morales melarang DEA<sup>16</sup> untuk beroperasi di Bolivia karena tindakan represif yang dilakukan DEA telah memberikan efek negatif terhadap petani koka terutama kelompok petani di wilayah provinsi Chapere.<sup>17</sup> Untuk melindungi keberlangsungan tanaman koka maka Morales menerapkan kebijakan membatasi area penanaman tanaman koka yaitu hanya terletak di Wilayah Yungas dan Chapere. Kemudian pemerintahan Morales mengatur undang-undang baru tentang tanaman koka untuk melindungi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tanaman koka yaitu pasal 384: *The State shall protect native and ancestral coca as cultural patrimony, a renewable natural resource of Bolivia's biodiversity, and as a factor of social*

---

<sup>14</sup> Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*, Zed Books, London, 2006, hlm, 151

<sup>15</sup> Linda C. Farthing dan Benjamin H. Kohl *Evo's Bolivia: Continuity and Change*. University of Texas Press. Austin. 2014 Hal.128

<sup>16</sup> Pemerintah Amerika Serikat membentuk badan penanggulangan narkoba yang bernama *Drug Enforcement Agency* (DEA) bekerjasama dengan Polisi Bolivia dalam operasi *Blast Furnace* yang bertujuan menghancurkan laboratorium kokain dan menangkap pelaku narkoba.

<sup>17</sup> *Coca Licensing Is a Weapon in Bolivia's Drug War* <http://www.nytimes.com>

*cohesion; in its natural state it is not a narcotic. Its revaluing, production, commercialization, and industrialization shall be regulated by law.*<sup>18</sup>

### **3. Korporasi/MNC**

#### **a. Kebijakan Nasionalisasi**

Berjarak empat bulan semenjak dirinya dilantik, Evo Morales segera merealisasikan janji kampanyenya dengan mengeluarkan Dekrit Presiden nomor 28701 tanggal 1 mei 2016 tentang nasionalisasi industri minyak dan gas bumi.<sup>19</sup> Isi dekrit ini adalah pengambilalihan saham swasta dalam bidang industri migas sebesar 51% oleh negara dan menetapkan *Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos* (YPFB) sebagai perusahaan induk negara dalam bidang migas dan mengatur segala urusan tata migas negara. selain itu, pajak pendapatan perusahaan minyak dan gas asing yang memproduksi lebih dari 100 juta kubik di naikan menjadi 82% dari yang semula 50%. Kemudian pemberian kuasa pada pemerintah Bolivia untuk mengaudit investasi dan keuntungan semua perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di negara Bolivia dan terakhir ijin ekspor migas dapat diberikan bila kebutuhan domestik telah terpenuhi.

Kebijakan renegotiasi dan nasionalisasi Evo Morales berpijak pada empat prinsip,<sup>20</sup> yaitu:

- Memulihkan kontrol negara terhadap sumber daya alam. Hal ini menegaskan kontrol negara dalam segala aspek industri pertambangan: eksplorasi dan prospeksi, eksploitasi, ekstraksi, pemurnian dan penjualan
- Menulis ulang hukum pertambangan, sebelumnya, dibawah rezim neoliberal Bolivia memiliki hukum pertambangan namun hukum tersebut dirasa terlalu menguntungkan korporasi multinasional.
- Memajukan industri tambang pada dua hal: (a) teknologi: semua perusahaan asing diwajibkan berbagi (alih teknologi) dengan

---

<sup>18</sup> *Plantean subir de 12 mil a 20 mil hectáreas de cultivos de coca* <http://www.opinion.com.bo>

<sup>19</sup> *The nationalisation of oil and gas* [www.boliviainfoforum.org.uk](http://www.boliviainfoforum.org.uk)

<sup>20</sup> *ibid*

perusahaan negara dan membantu meningkatkan kapasitas teknologinya di semua lapangan industri. (b) pelatihan bagi koperasi penambang dan penambang tradisional

- Memasukan partisipasi masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan untuk duduk dalam satu meja mendiskusikan masa depan pertambangan Bolivia.

#### b. Bergabung Dengan ALBA

Sejak memenangkan pemilu 2005, Morales berniat menjalin integrasi kerjasama regional dengan negara-negara Amerika Latin yang menginginkan kemandirian ekonomi terlepas dari ketergantungan dengan negara barat khususnya Amerika Serikat seperti Venezuela dan Kuba, untuk itu morales melakukan kunjungan ke Havana dan bertemu dengan presiden Castro dan Chavez. Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa pada april 2006, Bolivia resmi bergabung dengan Kuba dan Venezuela dalam mengembangkan *the bolivarian alternative for latin america and caribbean* (ALBA).<sup>21</sup>

Sebagai salah satu gebrakan baru amerika latin yang dimotori Hugo Chavez, lahirnya ALBA merupakan respon negara-negara amerika latin terhadap *Free Trade Area of Americas* (FTAA) yang didominasi oleh amerika serikat dan sebagai upaya membangun solidaritas kawasan amerika latin yang lebih mandiri. Sebagai “*Counter Hegemony*”, ALBA bekerja dalam tiga ruang. Pada ruang ide, negara-negara anggota percaya perlunya prinsip-prinsip saling melengkapi (*nocompetition*), solidaritas (*nodomination*) dan kerjasama (*noeksploitation*) untuk mencapai kemakmuran dan pemerataan pembangunan regional.<sup>22</sup> Pada ruang institusi, ide ini kemudian diintegrasikan dalam ALBA melalui pembagian struktur organisasi ALBA seperti Dewan Politik (*Political Council*) dan Dewan Ekonomi (*Economic Council*) memastikan upaya menandingi hegemoni neoliberalisme kemudian dapat terfasilitasi dengan adanya koordinasi kebijakan

---

<sup>21</sup> Barbara Stark. *International law and its discontents : confronting crises*, Cambridge University Press, New York. 2015, Hal 229

<sup>22</sup> ALBA (*the Bolivarian Alternative for Latin America and the Caribbean*): *Kerjasama Kawasan Selatan melawan Kemiskinan dan Ekslusi Sosial* <http://www.tabloiddiplomasi.org>

ekonomi politik diantara negara-negara anggota. Melalui Dewan Sosial (*Social Council*) dan Dewan Gerakan Sosial (*Social Movements Council*) dalam struktur organisasi menjadikan ALBA sebagai sebuah organisasi kerjasama regional yang didalamnya rakyat diikutsertakan dalam upaya mencapai kemakmuran dan pemerataan pembangunan.

Pada ruang implementasi atau proyek konkrit, ide tandingan neoliberalisme kemudian dimanifestasikan dalam 7 sektor Program kerja ALBA. Sektor-sektor yang dimaksud yaitu sektor finansial regional, perdagangan dan investasi, industri dan energi, sektor pangan, sektor sosial dan budaya, sektor lingkungan dan infrastruktur. Hingga saat ini, ALBA mampu menghasilkan berbagai gebrakan baru seperti terbentuknya *Bank of the South (Banco del Sur)*, sistem mata uang regional SUCRE (*Sistema Unico de Compensacion Regional / Unified System for Regional Compensation*). Dalam kerangka ALBA, terbentuk jaringan kerjasama industri-industri logam, minyak, jaringan kerjasama regional bagi pemenuhan kebutuhan pangan, terbentuknya jaringan komunikasi regional yang dalam hal ini terutama TeleSUR, dan terciptanya program-program bakti sosial khususnya di bidang kesehatan. Upaya untuk mencerdaskan rakyat melalui pemberlakuan sistem pendidikan gratis bagi rakyat kurang mampu juga merupakan pencapaian yang patut diapresiasi.

Meskipun anggotanya didominasi oleh pemimpin berhaluan kiri, ALBA tidak serta merta menolak kehadiran amerika serikat, namun dengan terbentuknya ALBA diharapkan hubungan antar negara-negara amerika latin dengan amerika serikat dapat lebih sederajat dengan berkurangnya dominasi amerika serikat.

## **Kesimpulan**

Peristiwa bangkitnya sosialisme yang terjadi di Bolivia mematahkan klaim neoliberal bahwa mengurangi peran negara justru akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan pada penduduk. Sepanjang dekade 1990-an setiap presiden Bolivia menerapkan formula neoliberal, namun hasilnya dalam bentuk politik maupun ekonomi terbukti mengecewakan, kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dipengaruhi kepentingan asing memunculkan lingkaran korupsi di

pemerintahan kemudian keadaan ekonomi yang tidak berkembang memunculkan perbedaan kelas dalam masyarakat.

Di Bolivia nilai-nilai kapitalisme dan neoliberalisme adalah suatu produk yang ditawarkan Amerika Serikat melalui duta besar, militer, dan korporasi sejak Presiden Victor Paz Estensorro, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer, Gonzalo Sanchez De Lozada Hingga Carlos Mesa. Namun sejak Bolivia dipimpin oleh Presiden Morales arah kebijakannya cenderung berseberangan dengan presiden-presiden sebelumnya, secara tegas Morales mengutuk kejahatan yang telah dilakukan Pemerintah Bolivia bersama Amerika Serikat, lembaga-lembaga kapitalis dunia seperti IMF, WTO, dan perusahaan multinasional.

Bagi Morales kinerja dari sistem kapitalis dan pengaruh Amerika Serikat dalam politik domestik Bolivia inilah yang membuat Bolivia semakin terpuruk dalam kemiskinan dan konflik sosial politik yang mendalam meskipun sebenarnya Bolivia kaya akan sumber daya alam seperti kopi, kedelai, koka, seng, timah, tembaga, minyak bumi, hingga cadangan gas yang merupakan terbesar kedua di Amerika Latin.

Oleh karena itu hanya lima bulan sejak dilantik, Morales mengeluarkan kebijakan yang menurutnya akan membawa banyak keuntungan dan akan mengembalikan kekayaan alam Bolivia yang selama ini dikuasai korporasi asing. Tanggal 1 Mei 2006 Morales mengeluarkan Dekrit Presiden nomor 29701 tentang nasionalisasi industri minyak dan gas. Nasionalisasi yang ditempuh Morales sendiri tidaklah berwujud nasionalisasi yang ekstrim tanpa adanya negosiasi dan ganti rugi, namun Morales memilih nasionalisasi yang hanya akan mengharuskan perusahaan-perusahaan asing melakukan penandatanganan kontrak kerjasama yang baru dengan Perusahaan Gas dan Minyak Bolivia YPFB.

29 April 2006, Bolivia resmi bergabung dengan Kuba dan Venezuela dalam mengembangkan *the bolivarian alternative for latin america and caribbean* (ALBA). Sebagai salah satu gebrakan baru Amerika Latin yang dimotori Hugo Chavez, lahirnya ALBA merupakan respon negara-negara Amerika Latin terhadap *Free Trade Area of Americas* (FTAA) yang didominasi oleh Amerika Serikat dan sebagai upaya membangun solidaritas kawasan Amerika Latin yang lebih mandiri.

Pada tanggal 10 september 2008, pemerintah Bolivia juga memberikan kesempatan pada Duta Besar Amerika Serikat untuk meninggalkan Bolivia dalam kurun waktu 72 jam. Duta Besar Philip Goldberg telah ditetapkan sebagai orang yang tidak diinginkan (*Persona non Grata*) oleh Pemerintah Bolivia atas dakwaan telah menentang Pemerintahan Bolivia dengan bersekutu dengan *media luna* yaitu sebuah koalisi gabungan dari provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi yang menuntut desentralisasi demi menggagalkan upaya nasionalisasi yang dilakukan Morales.

September 2008, Morales melarang DEA untuk beroperasi di Bolivia karena pemerintah Morales hendak menerapkan kebijakan baru tentang budidaya tanaman koka di Bolivia. selain itu, tindakan represif yang dilakukan DEA telah memberikan efek negatif terhadap petani koka terutama kelompok petani di wilayah Provinsi Chapere. pemerintahan Morales mengatur undang-undang baru tentang tanaman koka untuk melindungi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tanaman koka yaitu pasal 384 undang-undang baru ini didasarkan atas pernyataan Morales “*kami akan menerapkan kebijakan nol kokain, nol perdagangan narkoba, namun bukannya nol koka*”

Pada tanggal 1 Mei 2013 yang bertepatan pada hari buruh internasional, Morales menyatakan mengusir USAID dari Bolivia. Dalam pernyataannya, Morales mengatakan bahwa “*no lack of US institutions which continue to conspire against our people and especially the national government, which is why we’re going to take the opportunity to announce on this May Day that we’ve decided to expel USAID.*” Sebelumnya Morales juga mengecam USAID karena program mereka lebih condong ke arah politik daripada program sosial.

Morales adalah seorang pemimpin yang berasal dari kalangan petani, kharisma Morales sebagai pemimpin sangat berpengaruh terhadap diterimanya sosialisme di Bolivia. Dengan mengusung sosialisme baru atau juga sosialisme abad ke-21, Morales ingin menantang apa yang disebut neoliberalisme. sosialisme baru menjadi antitesa neoliberalisme. Agar ajaran sosialisme baru itu bisa dijalankan, kekuasaan harus direbut, bukan dengan revolusi atau pemberontakan, tapi melalui perekrutan pemimpin alamiah yang berakar dan berpijak pada rakyat.

Setelah terpilih sebagai presiden, Morales dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan pemerintahan diberi peran sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro, hal penting yang diabaikan kapitalisme. Namun, pemimpin yang lahir dari rakyat ini tidak dibiarkan bergerak tak terkendali, tapi terus dikawal oleh jaringan warga masyarakat (*civil society*). Sekalipun *civil society* tidak berperan sebagai regulator langsung, tapi sangat berperan strategis memengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan publik, terutama dalam bidang ekonomi dan politik.

### **Daftar Pustaka**

Lesley Gill, *Teetering on the rim: Global restructuring, daily life, and the armed retreat of the Bolivian state*, Columbia University Press.2000

*Leasing the Rain*, <http://web.archive.org>

*Lessons from Bolivia: Re-nationalizing the Hydrocarbon Industry*, <http://cepr.net>

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia, Jakarta, 1992.

Mark N. Hagopian. *Regimes, Movement, and Ideologies: A Comparative Introduction To Political Science*. Longman Inc. New York, 1978.

Suharko, *Gerakan sosial. Konsep, strategi, aktor, hambatan, dan tantangan gerakan sosial di Indonesia*. Averroes Press, Malang. 2006.

Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*, Zed Books, London, 2006.

*Bolivia accuses U.S. of funding Morales opponents* <http://www.reuters.com>

*Bolivia*. <http://www.state.gov>

*Unpacking US Democracy Promotion in Bolivia: From Soft Tactics to Regime Change* [lap.sagepub.com](http://lap.sagepub.com)

*Bolivian President Evo Morales Expels USAID* <http://www.bbc.com>

Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*, Zed Books, London, 2006

Linda C. Farthing dan Benjamin H. Kohl *Evo's Bolivia: Continuity and Change*.  
University of Texas Press. Austin. 2014

*Coca Licensing Is a Weapon in Bolivia's Drug War* <http://www.nytimes.com>

*Plantean subir de 12 mil a 20 mil hectáreas de cultivos de coca*  
<http://www.opinion.com.bo>

*The nationalisation of oil and gas* [www.boliviainfoforum.org.uk](http://www.boliviainfoforum.org.uk)

Barbara Stark. *International law and its discontents : confronting crises*,  
Cambridge University Press, New York. 2015,

*ALBA (the Bolivarian Alternative for Latin America and the Caribbean):  
Kerjasama Kawasan Selatan melawan Kemiskinan dan Ekslusi Sosial*  
<http://www.tabloiddiplomasi.org>